

SKRIPSI
PENGAWASAN PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA
USAHA RENDANG OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
PAYAKUMBUH

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Pembimbing:

Dr. Khairani, S.H., M.H.
Hendria Fithrina, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

No. Reg: 36/PK-VII/IV/2025

**LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET**
No. Reg: 36/PK VII/IV/2025

**PENGAWASAN PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA USAHA
RENDANG OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PAYAKUMBUH**

**LICENSING SUPERVISION OF HOUSEHOLD-SCALE INDUSTRY IN RENDANG
BUSINESS BY THE OFFICE OF INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED
SERVICES (DPMPTSP) OF PAYAKUMBUH CITY**

Disusun Oleh:
Author:

Reza Wahyudi
2010112095

Program Kekhususan (PK): Hukum Administrasi Negara (PK VII)
Concentration Program (CP): Administrative Law (CP VII)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal
25 Agustus 2025 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on
August 25th, 2025 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean

Prof.Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I

Dr. Khairani, S.H., M.H.
NIP. 196212111989012001

Pembimbing II
Supervisor II

Hendria Fithrina, S.H., M.H.
NIP. 196812281999032001

Penguji I
Examiner I

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.
NIP. 197502042006041001

Penguji II
Examiner II

Amedia Zulfitri, S.H., M.H.
NIP. 199006292024062002



No. Alumni Universitas	Reza Wahyudi	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Batam/ 13 Mei 2001 b. Nama Orang Tua : Yuzarman (Alm) & Nurjannati c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2010112095	f. Tanggal Lulus : 25 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 5 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3,78 j. Alamat : Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Limapuluh Kota	

PENGAWASAN PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA USAHA RENDANG OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PAYAKUMBUH

(Reza Wahyudi, 2010112095, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 2025, 123 Halaman)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perizinan industri rumah tangga pada usaha rendang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku usaha rendang di Kota Payakumbuh yang tidak memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Selain itu juga banyak terjadi pelanggaran perizinan berusaha baik pelanggaran teknis maupun pelanggaran administratif serta tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPMPTSP masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis maupun non-yuridis. Secara yuridis, tidak ada peraturan pelaksana daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme dan koordinasi pengawasan. Secara non-yuridis, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, serta optimalisasi koordinasi antar OPD agar pengawasan terhadap usaha rendang sebagai bagian dari industri rumah tangga dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan Berusaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Rendang, DPMPTSP, Hukum Administrasi Negara

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 25 Agustus 2025.
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II
Reza Wahyudi	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: Hendria Fithrina, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

No. University Alumni	Reza Wahyudi	No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth: Batam/ Mei 13 rd 2001 b. Parents Name : Yuzarman (Alm) & Nurjannati c. Faculty : Law d. Concentration : Administrativ Law e. No. BP : 2010112095	f. Graduation Date : August 25 th 2025 g. Predicate : Very Satisfactory h. Length of Study : 5 Years 0 Month i. GPA : 3,78 j. Adress : Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Limapuluh Kota	

LICENSING SUPERVISION OF HOME INDUSTRY IN RENDANG BUSINESS BY THE OFFICE OF INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICES (DPMPTSP) OF PAYAKUMBUH CITY

(Reza Wahyudi, 2010112095, Administrativ Law, Faculty of Law, Andalas University, Concentration Program Administrative Law (CP VII), 2025, 123 pages)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of licensing supervision of household-scale industry in the rendang business by the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Payakumbuh City and to identify the inhibiting factors in the supervision process. The background of this research lies in the fact that many rendang business actors in Payakumbuh City do not possess business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) and a Household-Scale Food Production Certificate (SPP-IRT). In addition, there are still frequent violations of business licensing, both technical and administrative, and the implementation of risk-based supervision has not been optimal in accordance with Government Regulation Number 28 of 2025 as an amendment to Government Regulation Number 5 of 2021. The research method employed is an empirical juridical approach with a descriptive-analytical character. Data were obtained through literature studies and interviews with DPMPTSP and relevant technical Regional Apparatus Organizations (OPD). The findings show that the implementation of supervision by DPMPTSP still encounters various obstacles, both juridical and non-juridical. Juridically, the absence of implementing regional regulations results in unclear mechanisms and coordination of supervision. Non-juridically, the obstacles include limited supervisory human resources, minimal budget allocation, and low awareness among business actors regarding the importance of licensing. This research recommends the necessity of strengthening regional regulations, enhancing the capacity of supervisory officials, and optimizing inter-agency coordination so that the supervision of rendang businesses as part of household-scale industry can be carried out effectively, accountably, and in accordance with the principles of administrative law.

Keywords: Supervision, Business Licensing, Household-Scale Industry, Rendang Business, DPMPTSP, Administrative Law

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August, 25th 2025

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II

Acquainted,

Head of the Departement of Administrativ Law: Hendria Fithrina, S.H., M.H.

Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the Number:

	Faculty/University
No. Alumni Faculty:	Name: _____ Signature: _____
No. Alumni University:	Name: _____ Signature: _____